

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) RUAS JALAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- 1. Maksud dan Tujuan** : Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk melakukan suatu kajian mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan standar mutu jalan yang berlaku di Indonesia.
- Tujuan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara adalah membuat suatu kajian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Provinsi bidang jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang meliputi :
- A. Kesesuaian terhadap standar jalan dengan persyaratan teknis antara lain :
 - ~ Teknis geometrik jalan;
 - ~ Teknis struktur perkerasan jalan;
 - ~ Teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
 - ~ Teknis pemanfaatan ruang bagian jalan;
 - ~ Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - B. Peningkatan kualitas layanan jalan provinsi melalui Penentuan kondisi jalan berdasarkan tingkat IRI/SDI - RCI/TTI;
 - C. Ketersediaan konektivitas pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi.
- 2. Sasaran** :
 - Tersedianya dokumen kajian Standard Pelayanan Minimum (SPM) jalan kewenangan provinsi di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
 - Tersedianya pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan Jalan di Provinsi Sumatera Utara
 - Terpenuhinya amanat UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006
- 3. Lokasi Pekerjaan** : Lokasi kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Provinsi yang terletak di Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara
- 4. Sumber Pendanaan** : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

- 5. Keluaran** :
- Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Kajian Penyusunan Pedoman SPM jalan kewenangan provinsi di wilayah kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara yang meliputi :
- a. Laporan Pendahuluan;
 - b. Laporan Antara;
 - c. Laporan Akhir;
 - d. Draft konsep Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Jalan Provinsi di Sumatera Utara;
 - e. Soft Copy Kegiatan.